

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 21 Nomor 1, Januari 2016

SUSI SARUMPAET

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Rasio Keuangan
Dalam Laporan Tahunan di Indonesia

AS SHAUMY GAHARA DAN DEWI SUKMASARI

Pengaruh Self Assessment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandar Lampung)

WIDYA RIZKI EKA PUTRI

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Pada
Perusahaan Pertambangan Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia

ADHITYA AGRI PUTRA

Pengaruh *Financial Leverage*, *Earning Per Share*, dan Pertumbuhan Laba
Terhadap Return Awal dan Return 15 Hari Pasca IPO

NIKEN KUSUMAWARDANI DAN FAJAR GUSTIAWATY DEWI

Implementasi Standar Pelayanan Minimal Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik
(Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Negeri/Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung)

RINDU RIKA GAMAYUNI

Dukungan Manajemen Sebagai Variabel Moderating Bagi
Efektivitas Fungsi Audit Internal Pada Pemerintah Daerah

FARICHAH

Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Bursa Efek Indonesia)

WAYAN KRISMA ANGGA PRATAMA DAN MEGA METALIA

Frekuensi Perdagangan Saham Beraksi Pada
Pengungkapan Informasi Akuntansi di Website

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

<http://fe-akuntansi.unila.ac.id/download/jak>

Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan ISSN 1410 – 1831

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 21 Nomor 1, Januari 2016

Penanggung Jawab:

Farichah

Ketua Penyunting:

Lindrianasari

Penyunting Pelaksana:

Rindu Rika Gamayuni

Penyunting Ahli/Mitra Bestari:

Zaki Baridwan

Universitas Gadjah Mada

Indra Wijaya

Universitas Gadjah Mada

Mahatma Kufepaksi

Universitas Lampung

Susi Sarumpaet

Universitas Lampung

Ratna Septiyanti

Universitas Lampung

Anggota Administrasi/Tata Usaha:

Suleman

Alamat Redaksi/Penerbit:

Redaksi Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Lampung

Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 705903, Fax. (0721) 705903

rindu.gamayuni@yahoo.com

Frekuensi terbit: enam bulanan

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 21 Nomor 1, Januari 2016

Daftar isi	i
SUSI SARUMPAET Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Rasio Keuangan Dalam Laporan Tahunan di Indonesia	1 - 15
AS SHAUMY GAHARA DAN DEWI SUKMASARI Pengaruh Self Assesment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandar Lampung)	17-28
WIDYA RIZKI EKA PUTRI Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia	29-43
ADHITYA AGRI PUTRA Pengaruh <i>Financial Leverage</i> , <i>Earning Per Share</i> , dan Pertumbuhan Laba Terhadap Return Awal dan Return 15 Hari Pasca IPO	45-54
NIKEN KUSUMAWARDANI DAN FAJAR GUSTIAWATY DEWI Implementasi Standar Pelayanan Minimal Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Negeri/Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung).....	55-62
RINDU RIKA GAMAYUNI Dukungan Manajemen Sebagai Variabel Moderating Bagi Efektivitas Fungsi Audit Internal Pada Pemerintah Daerah.....	63-75
FARICHAH Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Bursa Efek Indonesia).....	77-85
WAYAN KRISMA ANGGA PRATAMA DAN MEGA METALIA Frekuensi Perdagangan Saham Beraksi Pada Pengungkapan Informasi Akuntansi di Website	87-104

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN
PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandarlampung)**

As Shaumi Gahara

Alumni Program Studi Akuntansi Universitas Lampung

Email: shaumigahara@yahoo.com

Dewi Sukmasari

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Email: dewsukma@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to look at the effect of Taxable Entrepreneur (PKP) is registered, the Tax Payment (SSP) VAT paid-up, collection letter Paja (VAT STP) STP-effectiveness ratios published and VAT on VAT receipts. This study uses secondary data obtained from STO in Bandarlampung for the period 2012 - 2015. The method used in this research is multiple regression. The results of this study are listed and SSP VAT PKP significant positive effect on VAT revenue, while STP VAT and do not affect the effectiveness ratio of VAT revenue. This study succeeded in explaining the dependent variable as much as 89% of funds of 11% influenced by factors not examined.

Keyword: PKP, STP, SPP, and PPN.

A. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. (Anggun, 2015). Untuk itu fiskus selalu melakukan berbagai cara untuk mengefisiensikan dan mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Tercatat ada tiga sistem yang pernah digunakan Indonesia dalam pemungutan pajaknya, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga sekarang, Indonesia menganut *Self Assessment System* guna mengefisiensikan sistem pemungutan pajak. Selain reformasi perpajakan, hal lain yang dilakukan fiskus untuk memaksimalkan penerimaan adalah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat tagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak tepat dalam membayar pajak terhutangnya. Surat tagihan pajak.

Kondisi perpajakan di Indonesia sendiri belum 100% terealisasi sesuai target. Dalam kondisinya penyumbang *shortfall* terbesar penerimaan pajak yang meleset dari target tahun 2014 adalah pajak pertambahan nilai (PPN). *Shortfall* tersebut sebesar Rp 70,9 triliun, dengan hanya membukukan penerimaan Rp 404,7 triliun atau 85,1 persen dari target Rp 475,6 triliun (Sari, 2015).

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Sistem Perpajakan Indonesia

Menurut Resmi (2013), ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem dimana aparat perpajakan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pajak terhutang setiap wajib pajak berdasarkan undang – undang. Dalam sistem ini keberhasilan memungut pajak semuanya bergantung pada aparat pajak.

2. Self Assessment System

Sistem ini adalah sistem yang memberikan kewenangan penuh pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang mereka berdasarkan undang - undang. Wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami perundang – undangan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Menghitung sendiri pajak terhutang.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak terhutang.
- d. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak itu sendiri. Dalam *self assessmentsystem* ini fiskus hanya berperan sebagai pengawas dan pemeriksa.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ke tiga ini dilakukan sesuai dengan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ke tiga yang ditunjuk.

2. Surat Tagihan Pajak

Definisi dari surat tagihan pajak dijelaskan pada UU. No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (30) yang berbunyi surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Direktur Jendral Pajak menerbitkan surat tagihan pajak dalam hal :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian SPT, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur secara lengkap selain :

- a. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak) atau
- b. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak) serta nama dan tanda tangan (nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak) dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran.
6. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau
7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. (UU no. 16 tahun 2009 pasal 14 ayat 2).

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2005). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan yang dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target yang harus di capai.

$$\text{Rasio Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator efektivitas

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber :Depdagri, kepmendagri no.690.900.327 tahun 1996 dalam Erwis,2012)

4. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang kena pajak di dalam daerah pabean.(penjelasan pasal 7 ayat 2 UU no.42 tahun 2009)

1. Subjek pajak pertambahan nilai (PPN)

Dalam UU No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah , Subjek PPN terdiri dari :

- a. Pengusaha kena pajak (PKP)
- b. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP
- c. Orang pribadi yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2. Objek pajak pertambahan nilai (PPN)

Selain subjek pajak yang ditentukan pajak pertambahan nilai (PPN) juga memiliki karakteristik khusus dalam penentuan objeknya. Objek pajak pertambahan nilai (PPN) yang dijelaskan dalam UU. No. 42 tahun 2009 pasal 4 ayat (1) adalah :

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

3. Tarif PPN

Selayaknya pajak lainnya, pajak pertambahan nilai (PPN) juga memiliki tarif tertentu.

Dalam UU No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif pajak pertambahan nilai adalah :

- a. Tarif pajak pertambahan nilai adalah tarif tunggal yaitu 10 %
- b. Tarif pajak pertambahan nilai 0% diterapkan atas : ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

2.8 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Hasil
1.	Analisis Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tanjung Karang Bandar Lampung	Fatma Ayu Andini (2015)	X = Surat Tagihan Pajak Y = Penerimaan Pajak Penghasilan	Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan
2	Pengaruh Self Assesement System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (KPP Pratama Sleman, Yogyakarta)	Yohanes Kresna (2014)	X ₁ : PKP Terdaftar X ₂ : SSP PPN X ₃ : SPT PPN X ₄ : STP PPN Y : Penerimaan PPN	(1) PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, (2) STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. (3) Tidak ada

				<p>pengaruh antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN.</p> <p>(4) Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.</p>
3	<p>Pengaruh Self Assesment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (KPP Pratama Surabaya Gubeng, Surabaya)</p>	<p>Ika Nursanti dan Padmono (2013)</p>	<p>X₁ : PKP Terdaftar</p> <p>X₂ : SSP PPN</p> <p>X₃ : SPT PPN</p> <p>X₄ : STP PPN</p> <p>Y : Penerimaan PPN</p>	<p>(1) variabel PKP, SSP PPN dan STP PPN (X₁, X₃, dan X₄) yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen PPN (Y),</p> <p>(2) SPT Masa PPN (X₂) tidak berpengaruh terhadap (Y)</p> <p>(3) Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penerimaan PPN adalah variabel PKP (X₁)</p> <p>(4) Variabel PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN dan STP PPN (X₁ sampai dengan X₄) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel PPN (Y)</p>
4.	<p>Pengaruh <i>Self Assessment System</i>, Pemeriksaan</p>	<p>Rohmasari Sitio (2015)</p>	<p>X₁ : PKP Terdaftar</p>	<p>PKP terdaftar dan SSP PPN</p>

	Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (KPP Madya dan KPP Tampan Pekanbaru)		X_2 : SSP PPN X_3 : SPT PPN X_4 : STP PPN Y : Penerimaan PPN	berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. SPT PPN dan STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
--	---	--	---	--

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Self assessment system adalah sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia yang mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri. Melalui sistem ini diharapkan terjadi efisiensi dalam pengelolaan pajak dan terjadi peningkatan penerimaan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Kresna (2014) pengusaha kena pajak terdaftar dan surat setoran pajak terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

H1: Jumlah PKP terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

H2: Jumlah SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Surat tagihan pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh fiskus dalam rangka melakukan penagihan denda pajak maupun sanksi administrasi kepada wajib pajak yang menyebabkan hutang pajak wajib pajak bertambah. Dalam hal penagihan pajak pertambahan nilai pun demikian wajib pajak yang kurang dalam membayar utangnya akan diperingatkan dengan STP ini guna meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Hasil penelitian sebelumnya Andini (2015) surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H3 : Jumlah STP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Pengaruh fungsi pengawasan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Fungsi pengawasan dilakukan oleh fiskus dalam rangka menunjang pelaksanaan *self assessment system*. Dengan pengawasan yang baik diharapkan *self assessment system* berjalan sesuai prosedur dan terjadi peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai hingga mendekati target yang diinginkan.

H4: Rasio efektivitas STP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

4. Pengaruh *self assessment system*, surat tagihan pajak pertambahan nilai, dan fungsi pengawasan surat tagihan pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Self Assessment system*, surat tagihan pajak dan fungsi pengawasan pada hakikatnya adalah sistem dan alat guna meningkatkan keefisienan perpajakan serta kepatuhan wajib

pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku. Dengan terciptanya keefisienan dan kepatuhan wajib pajak tersebut, diharapkan jumlah penerimaan pajak meningkat.

H5: Jumlah PKP terdaftar, Jumlah SSP PPN, Jumlah STP PPN, Rasio Efektivitas STP PPN secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

C. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah KPP Pratama yang ada di provinsi lampung dengan metode pemilihan sample purposive sample dengan kriteria KPP Pratama yang ada di Kota Bandarlampung yaitu KPP Tanjung Karang, Teluk Betung dan Kedaton, untuk periode penelitian 2012 – 2015. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dari KPP Pratama dianalisis menggunakan asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asym.Sig 2 tailed* > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.
2. Uji multikolonieritas menunjukkan tidak ada variabel yang nilai VIF nya > 10, dan Tolerance nya < 0,01 dengan kata lain tidak terjadi multikolonieritas.
3. Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik menunjukkan gambar titik – titik tidak memiliki pola khusus dan tersebar di bawah dan di atas angka nol, dengan kata lain data tidak heteroskedastisitas.
4. Uji autokoralasi menggunakan run test menunjuka nilai *Asym. Sig 2 tailed* > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi pada data.

Uji Hipotesis

Tabel 1. Analisis regresi linier berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error				
		- 19337892403,388		-4,062	,000	
(Constant)	78547356250,280					
1	Pkp	28404973,303	7436288,650	,274	3,820	,000
	Ssp	11300003,568	739763,348	,834	15,275	,000
	Stp	-13209325,130	15366920,343	-,066	-,860	,395
	Rasio	- 10090513281,888		-,011	-,191	,850
		1925286190,362				

a. Dependent Variable: PPN

Berdasarkan Tabel 1 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\text{PPN} = - 78.547.356.250,280 + 28.404.973,303(X_1) + 11.300.003,568(X_2) - 13.209.325,130(X_3) - 1.925.286.190,362 (X_4)$$

1. Hasil uji variabel independen pertama (X_1) jumlah pengusaha kena pajak terdaftar, memiliki nilai t_{hitung} 3,820 dengan tingkat signifikansi 0,000. Jumlah sampel penelitian sebanyak 48 dengan jumlah variabel independen empat, taraf signifikansi 0,05 pengujian satu arah diperoleh t_{tabel} sebesar 1,68. Berdasarkan hasil tersebut $t_{hitung} > t_{tabel}$, tingkat signifikansi dibawah 0,05 serta nilai positif 3,820 dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, variabel jumlah pengusaha kena pajak terdaftar berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan PKP merupakan subjek pajak penerimaan PPN, penambahannya cenderung akan menambah penerimaan PPN.
2. Hasil Uji variabel independen kedua (X_2) jumlah surat setoran pajak disetor, memiliki t_{hitung} 15,275 dengan tingkat signifikansi 0,000. Jumlah sampel penelitian sebanyak 48 dengan jumlah variabel independen empat, taraf signifikansi 0,05 pengujian satu arah maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,68. Berdasarkan hasil tersebut $t_{hitung} > t_{tabel}$, tingkat signifikansi dibawah 0,05 serta nilai positif 15,275 dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, variabel jumlah surat setoran pajak (SSP) disetor berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan karena SSP PPN adalah buktinya setoran PPN yang dilakukan oleh WP. Sehingga penambahannya akan menambah penerimaan PPN.
3. Hasil Uji variabel independen ketiga (X_3) jumlah surat tagihan pajak (STP) PPN memiliki t_{hitung} -860 dengan tingkat signifikansi 0,395. Jumlah sampel penelitian sebanyak 48 dengan jumlah variabel independen empat, taraf signifikansi 0,05 pengujian satu arah maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,68. Berdasarkan hasil tersebut $t_{hitung} < t_{tabel}$, tingkat signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak, variabel surat tagihan pajak (STP) PPN yang diterbitkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan tidak semua dari jumlah yang terbit dapat terbayar, tidak terbayarnya STP dapat disebabkan, adanya keberatan dari WP sehingga dalam prosesnya jumlah STP masih terhitung terhutang, WP mengangsur, dan WP tidak setor.
4. Hasil uji variabel independen keempat (X_4) rasio efektifitas surat tagihan pajak t_{hitung} -191 dengan tingkat signifikansi 0,850. Jumlah sampel penelitian sebanyak 48 dengan jumlah variabel independen empat, taraf signifikansi 0,05 pengujian satu arah maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,68. Berdasarkan hasil tersebut $t_{hitung} < t_{tabel}$, tingkat signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak, rasio efektifitas surat tagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen penerimaan PPN.

Tabel 2. Uji statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	98914376619	4	24728594154	89,295	,000 ^b
Regression	01133000000		75283000000		
	0,000		0,000		
Residual	11908083525	43	27693217501		
	48237600000		1218030000,		
	0,000		000		
Total	11082246014	47			
	44937000000				
	00,000				

a. Dependent Variable: PPN

b. Predictors: (Constant), rasio, ssp, pkp, stp

Berdasarkan Tabel 2. Uji statistik F dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi F 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model layak untuk digunakan. Variabel-variabel independen yaitu PKP, SSP PPN, STP PPN, dan Rasio Efektivitas STP PPN secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen penerimaan PPN. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) PKP, SSP PPN, STP PPN, dan rasio efektivitas STPP PPN secara bersama sama mempengaruhi penerimaan PPN diterima.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PPN dikarenakan pengusaha pajak merupakan subjek dari pajak pertambahan nilai.
2. Jumlah surat setoran pajak (SSP) PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dikarenakan surat setoran pajak adalah alat dan bukti nyata untuk melakukan pemabayaran pajak terhutang.
3. Jumlah surat tagihan pajak (STP) PPN yang diterbitkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dikarenakan tidak semua dari jumlah yang diterbitkan berhasil tertagih, dan jumlah STP PPN yang berhasil tertagih rata- rata 62% dari jumlah terbitnya dan masih dalam kategori rendah.
4. Rasio efektivitas STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN selain dikarenakan rata-rata rasio efektifvitas yang masih dalam kategori kurang efektif juga karena STP PPN bukan satu-satunya alat yang digunakan fiskus dalam fungsi pemeriksaan dan pengawasannya dibuktikan dengan rasio kontribusi STP PPN terhadap penerimaan PPN yang rendah yaitu dibawah 3%.

5. Jumlah PKP terdaftar, SSP PPN, STP PPN, dan rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif pengusaha kena pajak menjalankan kewajiban perpajakannya disertai dengan pengawasan yang baik oleh fiskus, akan meningkatkan penerimaan PPN.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini terbatas pada data jangka waktu empat tahun yaitu dari Januari 2012 – Desember 2015.
2. Penelitian ini terbatas pada penggunaan dua faktor yang menggambarkan fungsi pemeriksaan dan pengawasan dari fiskus yaitu STP PPN dan rasio efektivitas STP PPN.
3. Penelitian ini terbatas pada tiga kantor pelayanan pajak pratama yang berada di kota madya sebagai sampel penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak KPP Pratama yang ada di Bandar Lampung hendaknya lebih meningkatkan kinerja dan giat dalam melakukan tindakan penagihan pajak, khususnya dalam penerbitan surat tagihan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya peningkatan penagihan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah sample, jangka waktu penelitian dan variabel yang menggambarkan fungsi pemeriksaan dan pengawasan fiskus seperti : surat ketetapan kurang bayar (SKPKB), dan surat paksa.

REFERENSI

- Anggun, F. 2015. Pengaruh Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada *KPP Pratama Tebet Jakarta Selatan*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Andini, A.F. 2015. Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar*. Jakarta. Salemba Empat.
- Erwis, N.A. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makasar Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin. Makasar
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM*

Hasanah, N.dan Indriani,S.Efektivitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus KPP Kebon Jeruk I).*Wahana Akuntansi* 8 (01) : 17 - 35

Hermawan Asep.2005. *Penelitian bisnis paradigm kuantitatif*. Jakarta.PT.Grasindo

Kresna,Y. 2014 Pengaruh Self Assesment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.Fakultas Ekonomi *Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta.

Merlando, M.J.2011.Pengaruh kepeimpinan, struktur, dan system penghargaan terhadap budaya organisasi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik *Universitas Bandarlampung*.Bandarlampung.

Nursanti,I dan Padmono 2013. .Pengaruh Self Assesment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. STIESIA 1 (2) : 122-136.

Resmi,S.. 2011.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta.Salemba Empat

Sari,D.2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Jakarta. Refika Aditama

Siti, R. 2015.*Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (KPP Madya dan KPP Tampan Pekanbaru*.Jom FEKON 6(2) Oktober 2015.

Soleh AZ.2005. *Ilmu Statistik Pendekatan Teoritis dan Aplikatif Disertai contoh Penggunaan SPSS*.Bandung.Rekayasa Sains.SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian*. Alfabeta, Bandung.

Sujarweni,W.2015.*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.Yogyakarta.Pustaka Baru Pres

Sumarsan,T.2015 *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Indeks

Tarjo dan Indra. 2006. . Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. Jakarta. *JAAI* Vol 10 No.1.

UU No. 16 Tahun 2009 tentang *tatacara dan ketentuan umum perpajakan*.

UU No. 42 Tahun 2009 perubahan ketiga UU no 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

Website

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.2015.*Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Oktober 2015*.<http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-31-oktober-2015>.diakses tanggal 20 Desember 2015.

Sari,EV.2015. Penerimaan Pajak Meleset 90 Triliun.
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150105184140-78-22529/penerimaan-pajak-2014-meleset-rp-90-triliun/>. Diakses 5 desember 2015.